

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
1.	Indikasi pencemaran Batang Bayang oleh PT. Kuatassi	Pertambangan	Verifikasi lapangan terkoordinasi dengan OPD terkait	1. Sungai Bayang Kab. Solok. 2. Indikasi pencemar Kegiatan pembangunan jalan Pasar Baru Pessel - Alahan Panjang , Kegiatan pembangunan jalan Jorong Dilan Nagari Muaro Aia dan aktivitas pertambangan.	Telah dilakukan verifikasi lapangan tanggal 7, 8, dan 15 Feb 2019 oleh Tim dari Pemprov Sumbar DLH, Dinas ESDM, Dinas PUPR, BKSDA, Balai Labkesda, , DLH Kab Solok dan DLH Kab. Pessel Dituangkan dalam Berita Acara tanggal 05 Maret 2019.	Telah ditindaklanjuti dengan pemberian Sanksi Administratif oleh DLH Kab. Solok.
2.	Pembakaran Lahan di Pulau Taraju Nagari Sungai Nyalo Kab. Pesisir Selatan	Perkebunan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab. Pessel	1. Berita Media online http://www.jurnalsumbar.com/31/12/2018 2. Pulau Taraju Nagari Sungai Nyalo Kab. Pesisir Selatan	1. Verifikasi Lapangan 17 Jan 2019 sekaligus memberikan keterangan kepada Polres Pesisir Selatan berdasarkan Surat Polres Pessel No. B 48/I/2019 Reskrim Tgl 09 Jan 2019 Permintaan Keterangan Ahli 2. Hasil ver.lap sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pembukaan lahan dengan pembakaran di lahan Sdr. Darman/Pak Datuk. • Lokasi bekas terbakar berada di APL dengan estimasi luas area terbakar 0,5 Ha. Lahan yang terbakar tidak sampai terkena tanaman mangrove di kaki bukit. 	Sudah dilakukan gelar perkara dan tidak memenuhi unsur pidana
3.	Dugaan penebangan kayu dalam kawasan hutan oleh KSU Wana Lestari	Kehutanan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Pessel	Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikasi lapangan dan penyelidikan dugaan penebangan kayu dalam kawasan hutan.	Dalam proses penanganan penegakan hukum KLHK
4.	CV. Batu Tongga Kab. Pesisir Selatan	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Pessel	Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kec. Air Pura, Kab. Pessel	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Pessel.	Para pihak diminta untuk melaksanakan musyawarah mufakat.
5.	Tambak Udang Ilegal Padang Pariaman	Perikanan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab. Padang Pariaman	Kecamatan Batang Anai, Batang Gasan dan Ulakan Tapakis Padang Pariaman	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Padang Pariaman. Pemkab Padang Pariaman telah melakukan penutupan terhadap beberapa tambak udang illegal tersebut.	Tindak lanjut oleh Pemkab Pd. Pariaman.

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
6.	Tambang Galian C Ilegal Pd. Pariaman	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Pd. Pariaman	Sungai Geringging Padang Pariaman	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu oleh DLH Prov. Sumbar, Satpol PP Prov. Sumbar, Pemkab. Pd. Pariaman bersama TNI dan Kepolisian yang dilanjutkan dengan penutupan lokasi tambang illegal dimaksud dan penyitaan terhadap seluruh alat penambangan yang digunakan.	Penghentian kegiatan penambangan.
7.	Tambang Ilegal Galian C Sawahlunto	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu Pemprov Sumbar dan Pemkab Sawahlunto	Sungai Bt. Ombilin Sawahlunto	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Sawahlunto. Penghentian kegiatan tambang illegal akan dilakukan terkoordinasi antara Pemprov. Sumbar dan Pemkab. Sawahlunto	Penghentian kegiatan penambangan.
8.	PT. PLN: PEMBANGUNAN TRANSMISI LISTRIK SUTT PASAMAN & GI DI KAB. PASAMAN & PASAMAN BARAT		Verifikasi lapangan oleh DLH Prov. Sumbar	Pasaman-Simpang Empat dan Lubuk Sikaping	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Uji Tahap Proyek tanggal 08 April 2019	Telah diberikan Sanksi Administratif oleh DLH Prov. Sumbar.
9.	Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bukittinggi	Peternakan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemko Bukittinggi	Sungai Bt. Agam	Telah dilakukan verifikasi lapangan tanggal 01 - 02 Mei 2019 oleh Tim Provinsi Sumbar (DLH Prov, UPTD Labkes Prov Sumbar) dan DLH Kota Bukittinggi.	Telah diberikan Sanksi Administratif oleh Pemko Bukittinggi
10.	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Perkebunan	Verifikasi lapangan terpadu dengan DLH Kab. Agam	PT. Pelalu Raya (2 lokasi berbatasan dengan anak sungai Batang Tompek)	Telah dilakukan verifikasi oleh DLH Kab. Agam Tanggal 13 Maret 2019 Telah dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi antara DLH, PSDA, UPTD Labkes Prov. Sumbar dengan DLH Kab. Agam tgl 22-23 April 2019.	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan gagal
11.	Penambangan Pasir Kab. 50 Kota	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab. 50 Kota	- Berita kompas tanggal 21 -22 Mei 2019 - Surat Kementrian Hukum dan HAM no. Republik Indonesia Nomor HAM-HA.01.02-156 perihal Permohonan Informasi terkait Penambangan Pasir di Sungai Batang Sinamar.	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan DPMPSTP, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Pemkab 50 Kota,	Penanganan lebih lanjut oleh Pemkab 50 Kota.
12.	PT. Taruko Putra	Pertambangan	Verifikasi lapangan	Pesisir Selatan	Verifikasi lapangan terpadu Pemprov Sumbar dan	Tindak lanjut oleh

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
	Nusantara		terpadu dengan Pemb. Pesisir Selatan		Pemb. Pesisir Selatan. Dari hasil verifikasi ditemukan lokasi tambang di luar IUP dan berada diantara 2 jembatan.	DPMPTSP terkait penghentian izin.
13.	PT. GEOMENEX SAPEK	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemb. Solok Selatan	Sungai Batang Hari	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemb. Solok Selatan dengan hasil verifikasi masih ditemukan bekas penambangan di badan sungai.	Sidang PTUN
14.	PT. Incasi Raya Sodetan Kab. Pesisir Selatan	Perkebunan	Verifikasi lapangan terpadu dengan KLHK dan Pemb. Pesisir Selatan	Sungai Batang Sindang Kec. Lunang Silaut Pesisir Selatan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Verifikasi lapangan terpadu dengan KLHK dan Pemb. Pesisir Selatan sekaligus monev sanksi administrasi paksaan pemerintah No. SK 4466/MENLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2016.	Dalam penanganan penegakan hukum KLHK
15.	PT. Incasi Raya Padang	Perkebunan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemko. Padang	Teluk Bayur Padang	Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH Kota Padang. Tumpahan minyak di laut telah dibersihkan dan DLH Kota Padang telah menerbitkan Sanksi Administrasi kepada perusahaan.	Telah ditangani oleh DLH Kota Padang dan telah diberikan Sanksi Administrasi.
16.	PT. Semen Padang	Pertambangan	Verifikasi pengaduan sekaliigus monev sanksi administrasi	PT. Semen Padang	Telah dilakukan verifikasi pengaduan sekaligus monev sanksi administrasi paksaan pemerintah bersama dengan tim BPPHLHK Wilayah Sumatera, dilanjutkan dengan pemasangan papan larangan untuk penghentian pembuangan air limbah stockpile batubara ke media lingkungan.	Telah keluar SK Pencabutan Sanksi Administratif dari KLHK
17.	;/	Perkebunan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemb. Solok Selatan	Solok Selatan	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemb. Solok Selatan sekaligus monev sanksi administrasi paksaan pemerintah. Pihak PT. BPSJ telah memenuhi seluruh kewajiban dalam Sanksi Administrasi. Telah dilakukan rapat dengan pihak perusahaan, masyarakat, Camat, Aali nagari DLH Kab. Solok Selatan terkait pemenuhan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat terkena dampak.	Kasus selesai dan DLH Solok Selatan telah mengeluarkan pencabutan SK sanksi administrasi.
18.	Pemotongan Bukit Palano Payakumbuh	Pertambangan	Verifikasi Lapangan terpadu dengan Pemko Payakumbuh	Bukit Palano Payakumbuh	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemko Payakumbuh dilanjutkan dengan Audiensi dengan Pemko Payakumbuh.	Pemko Payakumbuh sedang dalam proses penerbitan Sanksi Administratif terhadap pelaksana kegiatan .
19.	PLTU Ombilin dan	Pemanfaatan	Verifikasi	Desa Sijantang Kota Kab. Sawahlunto	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan	Pemenuhan tindak

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
	PT. Guguk Tinggi Coal	LB3	pengaduan dan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab. Sawahlunto	dan Desa Salak Kec. Talawi Kab. Sawahlunto.	Pemkab. Sawahlunto terhadap pengelolaan lingkungan PLTU Ombilin dan PT. GTC. Dari hasil verifikasi diketahui terjadi kerusakan alat pengendali debu milik PLTU Ombilin pada 16 Oktober 2019 dan perbaikan alat telah selesai pada 18 Oktober 2019 serta terdapat sejumlah ketidaktaatan terhadap izin lingkungan dan dokumen lingkungan serta ditemukan. DLH Prov. Sumbar telah mengirimkan surat tindak lanjut terkait hasil verifikasi ke DLH Kab. Sawahlunto.	lanjut hasil verifikasi lapangan oleh PLTU Ombilin dan PT. GTC dengan dimonitor oleh DLH Kab. Sawahlunto.
20.	PT. Berkat Bhineka Perkasa	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Sawahlunto	Sungai Batang Maek	Telah dilakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel oleh DLH Prov, DLH Kab. Lima Puluh Kota, Gakkum KLHK Sumatera dan Ditjen PPA KLHK.	Dalam proses pengawasan penataan dan penanganan penegakan hukum Gakkum KLHK dan akan diberikan sanksi Administratif oleh Pemkab Lima Puluh Kota
21.	CV. Tahiti Coal	Pertambangan	Verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Sawahlunto	Desa Sikalang Sawahlunto	Telah dilakukan verifikasi lapangan terpadu dengan Pemkab Sawahlunto dan dilanjutkan dengan kunjungan kerja Komisi IV. DPRD bersama Pemprov. Sumbar dan Pemkab Sawahlunto.	Tindak lanjut penutupan lubang tambang oleh Dinas ESDM Prov. Sumbar dan batas waktu penyelesaian dengan masyarakat oleh CV. Tahiti Coal dan Pemko.
22.	RM Lauk Pukek	Industri Rumah Tangga	Koordinasi dan Pelimpahan pengaduan ke DLH Pesisir Selatan sesuai kewenangan	Nagari Sago Sianik Painan Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH Kab. Pesisir Selatan dilanjutkan dengan penerbitan teguran tertulis kepada pemilik kegiatan. Pemilik kegiatan telah menindaklanjuti dengan mengelola limbah yang dihasilkan dan membuat saluran pembuangan air limbah.	Telah ditangani DLH Pesisir Selatan
23.	PT. Abai Siat Raya	Industri Crumb Rubber	Koordinasi dan Pelimpahan pengaduan ke DLH Kota Padang sesuai kewenangan	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang	Telah dilakukan verifikasi pengaduan oleh DLH Kota Padang dan pihak perusahaan diwajibkan untuk mengelola air limbah yang dihasilkan perusahaan sampai memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak mencemari badang air dan	Telah ditangani DLH Kota Padang dengan pemberian sanksi administrasi.

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
					menimbulkan bau.	

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	Progress Terakhir	Keterangan
24.	Catering CV. Zi	Industri Rumah Tangga	Koordinasi dan Pelimpahan pengaduan ke DLH Kota Padang sesuai kewenangan	Kel. Pasar Ambacang Kec, Kuranji Kota Padang	Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH Kota Padang dan dilanjutkan dengan pemberian Sanksi Administrasi Teguran Tertulis kepada Catering CV. Zi. DLH Kota Padang telah melakukan evaluasi terhadap pemuahan sanksi administrasi teguran tertulis.	Telah ditangani DLH Kota Padang dengan pemberian saksi administrasi.